

Perencanaan Kerja Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kabupaten Kuantan Singingi

M. Luckye Syah Raja¹ Sufian Hamim²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : m.luckyesyahraja@student.uir.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the process of village work plan formulation in supporting community empowerment in Sukamaju Village, Kuantan Singingi Regency. The focus of the study includes the planning process of the village work plan, the level of community involvement, and the role of the village government in empowerment activities. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village government officials, village institutions, and community members. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the formulation of the village work plan has been implemented in accordance with applicable regulations and involves the community through village deliberation forums; however, its implementation has not been fully optimal. This is indicated by the limited overall community participation and the lack of optimal assistance and evaluation of empowerment programs. The conclusion of this study indicates that the village work plan plays an important role in community empowerment, but it requires strengthening in terms of participation and program implementation. Therefore, it is recommended that the village government increase community involvement and strengthen assistance and evaluation mechanisms so that community empowerment can be carried out more effectively

Key Words : *planning, community empowerment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan rencana enelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan rencana kerja desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kabupaten Kuantan Singingi. Fokus penelitian meliputi proses perencanaan rencana kerja desa serta keterlibatan masyarakat dan peran pemerintah desa dalam kegiatan pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan rencana kerja desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh serta belum maksimalnya pendampingan dan evaluasi program pemberdayaan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana kerja desa memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, namun perlu penguatan dalam aspek partisipasi dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memperkuat pendampingan dan evaluasi program agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa merupakan proses strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kekuatan lokal. Masyarakat yang berdaya akan lebih mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Selain itu, pemberdayaan juga memperkuat kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar dapat berfungsi lebih optimal. Pembangunan berbasis potensi lokal akan semakin relevan jika masyarakat terlibat penuh, karena mereka yang paling memahami kebutuhan dan peluang yang ada. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi dan hak masyarakat dalam pembangunan desa.

Mengacu pada Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbang Desa dimaksudkan untuk menjadi sarana implementasi model perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat baik itu warga, lembaga kemasyarakatan, pihak swasta, maupun lembaga pemerintah yang ada di desa demi menghasilkan pembangunan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Renstra Desa dipandang sebagai dokumen fundamental yang menjabarkan visi dan misi kepala desa terpilih ke dalam arah kebijakan dan program prioritas pembangunan selama enam tahun ke depan. Pandangan ini menekankan bahwa Renstra bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan kerangka strategis yang memandu seluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan jangka menengah hingga perencanaan tahunan dan penganggaran desa. Renstra Desa memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi: 4 I. Rujukan utama dalam penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). II. Landasan dalam penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tiap tahun. III. Dasar penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dengan begitu, pandangan yang tertuang dalam regulasi ini menegaskan bahwa keberadaan Renstra Desa adalah bentuk konkret dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terarah, sistematis, partisipatif, dan akuntabel. Renstra juga dianggap sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip good governance di tingkat desa, karena mengharuskan adanya sinergi antara kepemimpinan kepala desa dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Desa). Renja Desa Sukamaju menampilkan arah pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Perencanaan pembangunan tersebut difokuskan pada lima bidang utama, yaitu bidang infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM), dan lingkungan. Kelima bidang ini dirumuskan sebagai prioritas pembangunan desa dalam rangka menjawab kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Sukamaju.

Setiap bidang pembangunan dirancang dalam bentuk program-program strategis yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan nyata dan operasional. Penyusunan program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta potensi lokal desa, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perumusan kegiatan dalam Renja Desa juga

mempertimbangkan prinsip partisipatif, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan. Adapun kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam Renja Desa Sukamaju disusun berdasarkan bidang, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemberdayaan bukan sekadar kegiatan tambahan dalam proses pembangunan, melainkan menjadi kerangka kerja utama yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat desa diberdayakan secara menyeluruh, maka akan tercipta kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi warga. Sejalan dengan pandangan tersebut, Pemerintah Desa Sukamaju mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan desa, khususnya pada bidang pemberdayaan ekonomi. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa difokuskan pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa sebagai salah satu sektor strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks Desa Sukamaju, pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada sektor ekonomi melalui pengembangan UMKM desa. Hal ini sejalan dengan RPJMDes Sukamaju pada tahun 2024-2025 yang dimana pemerintah Desa Sukamaju merencanakan beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terbagi ke dalam beberapa bidang kegiatan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Adapun kegiatan pemberdayaan ekonomi desa melalui program UMKM yang direncanakan dan telah dilaksanakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian: Bagaimana proses penyusunan rencana kerja desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan proses penyusunan rencana kerja desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kabupaten Singigi?

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis, sebagai pengembangan Ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat Akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca dan peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.
3. Manfaat Praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pemerintah desa sukamaju kabupaten Kuantan singingi dalam melaksanakan Tugas Pokok.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Negara lahir sejak 1887, yang lahir dari seorang presiden Amerika Serikat dengan nama Woodrow Wilson yang menjabat pada 1913-1921. Menurut Wilson, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit menerapkan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan konstitusi dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai ilmu administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik (Clements, K. A. 1998).

Konsep Organisasi Publik

Organisasi berasal dari bahasa Yunani Organon, yang berarti “alat” (tool). Kata ini termasuk ke bahasa Latin, menjadi organizatio dan kemudian ke bahasa Perancis (abad ke-14) menjadi organization (Kusdi, 2009). Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Beberapa orang yang terlibat dalam suatu organisasi akan selalu mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, secara terus menerus. Sekelompok orang ini akan terus melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam organisasi.

Konsep Manajemen Publik

Secara harfiah manajemen sebagai sebuah cara agar tujuan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Manajemen sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Baik itu manajemen untuk kegiatan individu maupun kelompok. Pengertian manajemen secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Konsep Pelayanan Publik

Secara etimologi pelayanan dapat diartikan sebagai usaha melayani orang lain, banyak yang memberikan pengertian bahwa pelayanan yang dimaksud adalah memberikan hak dasar kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalam pelayanan dituntut oleh orang yang benar-benar profesional dalam rangka memberikan layanan yang maksimal dan profesional. Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 24 ayat 1 berbunyi bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan Pelayanan Publik.

Konsep Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah atau pemerintah desa, sebagai bentuk operasionalisasi dari Rencana Strategis (Renstra). Renja memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, target program, hingga

pagu anggaran untuk periode satu tahun. Dokumen ini menjadi jembatan antara visi jangka menengah dan implementasi jangka pendek dalam sistem pembangunan nasional. Toar, Kasenda, dan Singkoh (2019) menyatakan bahwa Renja adalah alat untuk menjaga konsistensi arah pembangunan tahunan dengan kebijakan strategis yang lebih luas. Hal ini penting untuk mencegah duplikasi program dan memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan. Renja juga berfungsi sebagai dasar evaluasi terhadap capaian kinerja tahunan instansi pemerintah. Dengan demikian, Renja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan operasional.

Konsep Manajemen dan Perencanaan Strategis

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai penentu sekaligus pemberi arah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan suatu pekerjaan dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Perencanaan yang disusun dengan baik juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan strategis merupakan suatu proses dalam menetapkan strategi, arah, serta pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan jangka panjang. Penyusunan perencanaan strategis menjadikan organisasi lebih terencana dan sistematis dalam mencapai tujuannya. Secara umum, proses penyusunan rencana strategis (Renstra) merupakan langkah untuk menata dan mempersiapkan organisasi agar mampu mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Renstra berfungsi sebagai peta jalan (road map) yang mengarahkan organisasi menuju kondisi ideal yang dicita-citakan untuk dicapai dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan. Pursero (20028).

Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sudah tidak asing lagi, mengingat saat ini berbagai program pemberdayaan telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial atau kemasyarakatan, serta pihak swasta. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengelola, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004 serta Program Pembangunan Daerah, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk 29 meningkatkan keberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi, sosial, dan politik melalui penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat lokal, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, serta peningkatan keswadayaan masyarakat. Sebagai kegiatan yang berorientasi langsung kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pusat sekaligus subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat memerlukan konsep dan strategi yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut penting untuk mempermudah serta mendukung keberhasilan peran fasilitator atau pendamping, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

memahami secara mendalam dan menyeluruh suatu fenomena sosial dari sudut pandang para informan, dengan pendekatan yang deskriptif dan berlangsung dalam setting alamiah. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan secara langsung di Kantor Desa Sukamaju, sehingga peneliti dapat melihat, mengamati, dan memahami secara utuh dinamika yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat desa. Penelitian kualitatif memungkinkan pemecahan masalah berdasarkan data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh tentang kondisi dan realitas yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan analisa pengumpulan data, data kemudian di reduksi dan selanjutnya data disajikan didalam kategori data. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data dari sumber informasi yang kemudian di sesuaikan berdasarkan kategori untuk dijabarkan kedalam satu sintesa dan kemudian peneliti menjelaskan berdasarkan subntansi materi jawaban yang diberikan kepada pihak berkontribusi teknis pengelolaan rusunawa serta pengguna.

Hasil dan Pembahasan

Perumusan Rencana Kegiatan

Perumusan rencana kegiatan merupakan proses penyusunan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju, Kabupaten Kuantan Singingi. Rencana kegiatan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan kerja desa yang telah dilaksanakan serta kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Rencana kegiatan dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan kerja desa agar lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Perencanaan kerja desa berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan perencanaan yang mampu mengakomodasi potensi desa serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan keterangan semua informan tersebut, dapat dianalisis bahwa perumusan rencana kegiatan di Desa Sukamaju dilaksanakan secara partisipatif dan sistematis. Masyarakat dilibatkan aktif melalui musyawarah desa dan musyawarah 56 dusun, sementara BPD berperan menampung dan membahas aspirasi masyarakat untuk disepakati bersama pemerintah desa. Peran administrasi perencanaan yang tertib dijalankan oleh Sekretaris Desa dan Sekretaris BPD menjadi dasar penting agar setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki dokumen yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, staf bidang pemberdayaan memastikan bahwa usulan kegiatan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bersumber dari musyawarah desa, masukan masyarakat, LPM, dan evaluasi kegiatan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara pencapaian kerja desa belum sesuai perumusan rencana kerja yang baik karena masih ada kesengajangan rposedur pelaksana, sebagaimana dijelaskan menurut Sufian Hamim (2023) bahwa perumusan rencana kerja yang baik harus jelas 7 indikator, antara lain: jelas tujuan, jelas pelaksana, waktu, tempat, anggaran, prosedur dan alasan.

Penggerakan

Penggerakan merupakan proses mengarahkan, mendorong, dan memotivasi seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif. Penggerakan menjadi tahap penting dalam manajemen karena berfungsi untuk mengubah rencana kerja menjadi tindakan nyata melalui keterlibatan aktif

aparatus desa dan masyarakat. Dalam konteks perencanaan kerja desa, penggerakan bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan. Penggerakan dilakukan melalui pemberian arahan, pembinaan, koordinasi, serta penciptaan suasana kerja yang kondusif sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Penggerakan yang efektif ditandai dengan adanya komunikasi yang baik, kepemimpinan yang mampu memberi teladan, serta dukungan terhadap inisiatif masyarakat. Dengan penggerakan yang optimal, pelaksanaan perencanaan kerja desa diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan mampu meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Desa Sukamaju.

Berdasarkan keterangan semua informan, dapat dianalisis bahwa penggerakan pelaksanaan rencana kerja desa di Desa Sukamaju berjalan secara terkoordinasi, partisipatif, dan berjenjang. Akan tetapi penggerakan kegiatan dari hasil wawancara 59 belum sesuai dengan baik dalam hal pelaksanaan pelatihan terlihat dari aspek komunikasi dan motivasi serta koordinasi. (Sufian Hamim, 2018)

Evaluasi Dan Pengawasan Kegiatan

Evaluasi dan pengawasan kegiatan merupakan proses penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan kerja desa untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program, kendala yang dihadapi, serta dampak kegiatan terhadap pemberdayaan masyarakat. Pengawasan kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan, pemerintah desa dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan pemanfaatan sumber daya desa digunakan secara tepat sasaran.

Dari hasil wawancara tergambar evaluasi dan pengawasan program tidak dilakukan ketika kegiatan berlangsung., Sufian Hamim (2018) menyampaikan bahwasanya program kegiatan yang baik seharusnya dilakukan bukan setelah kegiatan. (Sufian Hamim, 20218).

Output dan Outcome

Output dan outcome merupakan hasil yang dicapai dari pelaksanaan perencanaan kerja desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Output merujuk pada hasil langsung yang dapat diukur dari pelaksanaan kegiatan, seperti terlaksananya program, terbentuknya kelompok masyarakat, atau tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, outcome mengacu pada dampak yang dirasakan dalam jangka menengah hingga panjang, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, perubahan perilaku, serta meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pencapaian output dan outcome menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan perencanaan kerja desa. Output yang terlaksana dengan baik diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya outcome yang sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai perlu diperhatikan secara menyeluruh.

Berdasarkan keterangan semua informan, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan perencanaan kerja desa di Desa Sukamaju menghasilkan output yang jelas berupa dokumen perencanaan, laporan, arsip kegiatan, serta peningkatan keterampilan dan keterlibatan masyarakat. Sementara outcome-nya terlihat dari meningkatnya partisipasi, kemandirian,

kesadaran masyarakat, dan tertib administrasi desa. Pelaksanaan perencanaan kerja desa di Desa Sukamaju berjalan secara partisipatif, terstruktur, dan berkelanjutan

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian tentang Perencanaan Kerja Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju, Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan kerja desa telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, penggerakan, evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan desa. Masyarakat mendapatkan dampak positif berupa meningkatnya keterampilan, pengetahuan, kemandirian, partisipasi, dan kesadaran dalam mendukung pembangunan serta kegiatan pemberdayaan di desa. Administrasi kegiatan juga tertata dengan rapi, sehingga memudahkan evaluasi dan pengawasan kegiatan secara transparan dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala. Tidak semua warga dapat berpartisipasi maksimal karena kesibukan pekerjaan dan keterbatasan waktu. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung kegiatan terkadang membatasi cakupan program, sehingga beberapa warga belum sepenuhnya merasakan manfaat dari seluruh kegiatan pemberdayaan. Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat juga perlu diperluas agar setiap warga dapat terinformasi secara menyeluruh. Dengan demikian, perencanaan kerja desa di Desa Sukamaju terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat, tetapi masih perlu perbaikan terkait jangkauan partisipasi, sosialisasi, dan pemanfaatan sumber daya agar manfaat kegiatan lebih merata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adrian, A., Alwi, S., & Nur, S. (2020). Studi efektivitas Musrenbang di Kecamatan Lembo, Konawe Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan*, 5(1), 45–52.
- Agasi, O. J. A. H. (2016). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(6), 1–8.
- Ahmad Farouq Mulku Zahari at all (2023). Reformasi Administrasi Publik
- Clements, K. A. (1998). Woodrow wilson and Administrative Reform. 28(2), 320–336
- Eko, S. (2016). Desa membangun Indonesia. Yogyakarta: Insist Press
- Hamim, S., & Muchlis, I. (2016). Manajemen strategis dalam pembangunan. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hamim, S. (2005). Administrasi organisasi dan manajemen. Pekanbaru: UIR Press.
- Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Mandar.
- Keban, Y. T. (2004). Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu. Gava Media. Kecerdasan Emosional, dan budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai. (2015).
- Kusdi. (2009). Teori Organisasi dan Administrasi. SalembaHumanika: Jakarta
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.
- Miftah Thoha (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontempore.
- Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Caraka Prabu*, 1(01), 22– 36.
- Rokhamah, Pramugara Robby Yana & Nour Ardiansyah Hernadi dkk (2024), Metode penelitian Kualitatif 69

- Setyadiharja, R. (2018). Efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanjungpinang Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 71–88.
- Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi. Struktur, Desain & Aplikasi*. Arcan
- Toar, K. T., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2019). Efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 30–39.
- Zulkifli. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Buku Ajar: Manajemen. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh